

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP
DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA
PENGECCUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Fikri Alqian.N

NPP. 29.1381

Asdaf Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: alqianfikri25@gmail.com

ABSTRACT

Unqualified Opinion (WTP) on the financial statements of the Pangkep Regency Government in 2020 again received the 10th (tenth) WTP opinion with 9 of them being obtained in a row. In previous years, obtaining an opinion on LKPD only received a Fair opinion. The management of fixed assets is very important in maintaining the WTP opinion on LKPD. This study aims to determine the implementation of fixed asset management, the influencing factors and the efforts that have been made by the BKAD to maintain the opinion of the WTP in Pangkep Regency. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The management of fixed assets in Pangkep Regency is running quite well but there are still various inhibiting factors such as difficulty in obtaining proof of completeness of fixed assets, missing fixed assets, difficulties in the asset write-off process, and low human resources who carry out asset management. Efforts that have been made by the BKAD include completing documents on fixed assets, submitting a trial to MP-TGR for lost fixed assets, conducting an accurate assessment of fixed assets, increasing employee competence by attending education and training (Diklat)

Keywords: Management Optimization, Fixed Assets, Financial Statement Opinion

ABSTRAK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep pada tahun 2020 kembali mendapatkan opini WTP yang ke 10 (sepuluh) dengan 9 diantaranya didapatkan secara berturut-turut. Pada tahun-tahun sebelumnya perolehan opini atas LKPD hanya mendapat opini Wajar Pengelolaan aset tetap merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKAD untuk mempertahankan opini WTP di Kabupaten Pangkep Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep berjalan cukup baik namun masih

terdapat berbagai faktor penghambat seperti kesulitan dalam memperoleh bukti kelengkapan atas aset tetap, adanya aset tetap yang hilang, kesulitan dalam proses penghapusan aset, serta rendahnya sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan aset. Upaya yang telah dilakukan oleh BKAD antara lain melengkapi dokumen atas aset tetap, melakukan pengajuan sidang kepada MP-TGR atas aset tetap yang hilang, melakukan proses penilaian aset tetap secara akurat, meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Kata Kunci: Optimalisasi Pengelolaan Aset, Aset Tetap, Opini Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan secara transparan, termasuk pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah tiap tahun anggarannya. Pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa perubahan yang sangat baik bagi negara Indonesia hal tersebut dikarenakan proses pelaksanaan yang sebelumnya system pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan dampak positif dimana daerah diberikan kesempatan dan otonom yang luas dalam mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara demokratis dan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap asas-asas yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan menggunakan salah satu asas yaitu asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah terjadi adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yakni pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2018 tentang pelaksanaan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan yang dilaksanakan dan disusun oleh Pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut dilakukan oleh daerah-daerah yang selanjutnya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan BPK berperan sebagai auditor atau pemeriksa laporan keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta

merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Opini audit terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Laporan Keuangan yang baik dapat ditandai dengan tercapainya opini WTP. Pemerintah akan memberikan reward bagi pemerintah daerah yang dapat menunjukkan intensif laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP. Berpacu pada target pemerintah mengenai perolehan opini WTP Pemerintah Kabupaten Pangkep pada tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 (sepuluh) dengan 9 (sembilan) diantaranya didapatkan secara berturut-turut. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) di dapatkan pertama kali pada tahun 2005 danputus hingga akhirnya pada tahun 2012 kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga sekarang ini. Pencapaian ini masih terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) terutama dalam penatausahaan aset tetap yang masih terdapat berbagai kendala. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam rangka mempertahankan kembali pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun berikutnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Paragraf 5 menyebutkan “Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kabupaten Pangkep sebanyak 10 kali dengan 9 diantaranya didapatkan secara berturut-turut bukan berarti tidak memiliki celah permasalahan terutama dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep seperti masih adanya kendaraan dinas yang belum memiliki Surat Tanda Kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB. Tepat tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 26 kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan atas kendaraan dinas yang dimana 3 diantaranya tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kepemilikan (STNK), 11 kendaraan dinas yang tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta 12 kendaraan dinas yang tidak memiliki STNK maupun BPKB. Selain adanya permasalahan aset tetap pada peralatan dan mesin dalam hal ini kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan, terdapat beberapa permasalahan pada aset tetap tanah yang dimana masih terdapat tanah-tanah yang belum bersertifikat Adapun tanah-tanah tersebut yang belum memiliki sertifikat yaitu tanah-tanah yang berada dibawah kuasa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep yang terdiri dari 21 instansi dengan luas keseluruhan 695.233 m² yang mencapai total harga pasar sebesar Rp 160,839,569,147. Adapun instansi yang mengelola tanah daerah yang belum memiliki sertifikat dengan luas serta harga yang paling besar yakni dinas pendidikan dan kebudayaan dengan luas

456.875 m² serta memiliki harga pasar Rp. 56.235,560,000 yang dimana tanah-tanah tersebut diperuntukkan atas bangunan gedung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta tanah atas bangunan perumahan guru. Selain itu, adapun instansi yang mengelola tanah daerah yang belum memiliki sertifikat dengan luas serta harga pasar yang paling kecil yakni Kecamatan Tondong Tallasa dengan luas 336 m² dan memiliki harga Rp.117.480.000 yang dimana tanah tersebut diperuntukkan atas bangunan gedung kantor Desa Tondongkura dan kantor Desa Lanne. Selain itu masih terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) terutama dalam penatausahaan aset tetap yang masih terdapat berbagai kendala. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam rangka mempertahankan kembali pencapaiannya yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan aset. Penelitian Agustin Dwi Tantari berjudul Upaya DPKAD Kabupaten Kebumen Untuk Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun Anggaran 2010-2011. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang berbagai upaya dari DPKAD dalam mempertahankan opini WTP di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2011, upaya-upaya tersebut sebagai berikut: Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, Peningkatan kapasitas SDM sebagai pengelola keuangan, Penyelesaian atas temuan dari hasil pemeriksaan BPK, serta Penyelesaian dinamika pemeriksaan. Penelitian Petra Yosalya Molle berjudul Strategi Pengelolaan Aset Tetap dalam Meningkatkan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Provinsi Maluku. Penelitian ini menghasilkan strategi BPKAD Kabupaten Seram Barat dalam pengelolaan aset tetap untuk meningkatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), antara lain, mempermudah pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan dasar hukum melalui penggunaan teknologi yang memadai dan melakukan pemantauan di lapangan terhadap kinerja SDM dalam mengelola aset daerah serta mengoptimalkan sistem akuntansi akrual dengan teknologi yang ada serta mengefektifkan struktur kelembagaan untuk melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penggunaan BMD. Penelitian Hanifah Afdisyah berjudul Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Dalam penelitian ini dihasilkan Strategi Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), antara lain: Mensosialisasikan Peraturan Walikota Solok No 103 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok, Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsolidasi antar bidang, Meningkatkan komitmen koordinasi. Penelitian Ricardo Ricardo, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati berjudul optimalisasi pengelolaan aset tetap dengan pendekatan soft sytem methodology pada BPKAD Kota Pekanbaru menunjukkan permasalahan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Pekanbaru karena belum diimplementasikan dan belum diperbaharui standard operating procedure (SOP) pengelolaan aset tetap sesuai dengan peraturan terbaru. Selain itu kelemahan pada kompetensi

sumber daya manusia dan belum dimanfaatkannya teknologi informasi secara optimal, oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan kepada BPKAD Kota Pekanbaru agar menyusun standard operating procedure (SOP) sesuai peraturan perundang- undangan terbaru pengelolaan aset tetap serta memberikan pelatihan dan sertifikat sumber daya. Penelitian Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat Ilat, Sherly Pinatik berjudul analisisn pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada DPPKAD dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang miloh daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Penelitian Auliah Asman, Akram Akram , MT Alamsyah berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang bertujuan untuk menganalisis dampak dari aset persediaan, audit hukum aset, penilaian dan pengawasan, dan pengendalian aset mampu optimalisasi manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) di Kabupaten Sumbawa. manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukakn oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan Iokus penelitian, penulis mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori dari siregar (2016: 91) mengenai manajemen aset daerah yang terdiri dari: inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian, yang akan dibahas guna memperoleh opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Iaporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih pada tahun sebelumnya. PeneIitian ini akan dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi pengelolaan aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah dalam melaksanakan penelitian tentang pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep. Dalam penelitian kualitatif teori dikembangkan selama proses pengumpulan data. Serta melibatkan interpretasi dan pendekatan naturalistik untuk materi pokoknya. Sehingga dapat digambarkan bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam latar alamiah mereka, mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam konteks makna mereka. Selanjutnya, pendekatan induktif adalah proses penalaran yang menggambarkan atau melukiskan fenomena serta mendapatkan data dari responden di lapangan, yang kemudian dilakukan penelitian agar dapat memecahkan permasalahan. Dalam penentuan informan didasarkan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti berdasarkan pada pengetahuan serta keahlian khusus yang dimiliki oleh individu maupun kelompok atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai sampel yang mewakili populasi dalam penelitian. *Purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel guna memberikan informasi secara tepat dan akurat sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data serta keterangan mengenai optimalisasi pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kabupaten Pangkep dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Untuk sumber data, penulis menggunakan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan guna memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Adapun data primer yang dibutuhkan, meliputi hasil wawancara dari informan yang dianggap ahli atau mengerti di bidang pengelolaan aset tetap, hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun ke lapangan mengenai pengelolaan aset tetap di BKAD Kabupaten Pangkep. Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti guna melaksanakan penelitian yakni meliputi: Dokumen-dokumen mengenai aset yang ada di Kabupaten Pangkep, Dokumen mengenai pemindahtanganan aset tetap Kabupaten Pangkep, Dokumen mengenai kepemilikan aset tetap di Kabupaten Pangkep. Untuk memperoleh suatu data yang kompleks, mendalam serta empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai perilaku serta berbagai aktivitas dari individu-individu yang berada di lokasi penelitian. Wawancara dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang

memang ingin diketahui oleh peneliti), dan juga menggunakan metode wawancara berstruktur yang mana dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara lebih terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara dan berbagai pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis.

Wawancara berstruktur yang bersifat terstruktur dan menggunakan pedoman sistematis dalam proses wawancara kepada para informan serta telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan kepada yang dianggap ahli atau yang berkompeten dibidangnya seputar dengan pengelolaan aset tetap, faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap, serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan aset tetap di BKAD Kabupaten Pangkep. Penulis juga akan melakukan observasi partisipatif yang mana penulis ikut aktif dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Pangkep dalam hal pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep. Dan dokumentasi dimana peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diary, surat, email. penulis menggunakan teknik Pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama atau yang dikenal dengan Triangulasi Teknik. Dengan kata lain, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara terstruktur, serta dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber yang sama hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat diuji kredibilitas datanya, serta dapat meningkatkan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti akan memilih data dan informasi mana yang akan digunakan dan sesuai dengan dengan objek studi. Lalu peneliti akan meringkas data dan informasi yang telah dipih dalam bentuk yang lebih ringkas baik itu tabel, grafik, hubungan antara kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Lalu peneliti akan menarik kesimpulan yang mendukung untuk pengumpulan data ke tahap berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep, adapun aset tetap tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan Jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Berkaitan dengan kondisi dari aset tetap yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Pangkep, berikut ini merupakan jumlah keseleuruhan aset tetap yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pangkep per 31 Desember 2020 yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020

| No | Nama | Jumlah (Rp) | Ket |
|-----|------------------------------|----------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tanah | 197.279.759.302,34 | |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 545.887.292.178,47 | |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 1.042.186.207.198,42 | |
| 4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.111.026.702.280,27 | |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 18.473.568.042,73 | |
| 6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | 43.438.438.649,86 | |
| | Jumlah | 3.958.291.967.652,09 | |

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkep 2020

BKAD mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta harus menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Aset yang dikenal sebagai Laporan Posisi Keuangan dan menyajikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun periode anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep. Aset tetap merupakan salah satu komponen yang termuat dalam neraca daerah Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep telah mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali dengan 9 diantaranya didapatkan secara berturut-turut Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap seperti aset tetap tanah yang belum bersertifikat, dan aset tetap peralatan dan mesin dalam hal ini kendaraan dinas yang bermasalah seperti tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan atas kendaraan dinas tersebut, seperti tidak memiliki Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selain permasalahan mengenai aset tetap peralatan dan mesin dalam hal ini kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan atas kendaraan dinas, permasalahan selanjutnya yaitu terdapat aset tanah pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat. Berkenaan dengan permasalahan pengelolaan aset tetap yang ditangani oleh BKAD pada dasarnya mempengaruhi atas pemberian opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah, BKAD berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam mengelola aset daerah, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap. Penelitian ini disusun oleh peneliti dengan melakukan analisis data yang diperoleh di lapangan, baik berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya atau yang dianggap memiliki keahlian dibidangnya (purposive sampling) serta didukung oleh data sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aset daerah terkhusus aset tetap. Peneliti menguraikan berbagai data tersebut dalam bagian pembahasan ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset tetap di Kota Jambi dengan didasarkan teori dari Siregar (2016: 91) yang membagi Manajemen Aset kedalam berbagai tahapan seperti berikut ini:

1. Identifikasi dan inventarisasi
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengawasan dan Pengendalian

3.2 Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan terhadap aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan dan pengendalian. BKAD selaku pembantu pengelola dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset tetap tersebut selalu berkoordinasi dengan seluruh personil yang terlibat didalamnya, terutama pengurus barang pengguna. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi, dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh BKAD tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melainkan masih terdapat berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Adapun hambatan-hambatan yang terdapat dalam kegiatan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Jambi
- b. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BPKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- d. Koneksi jaringan SIPKD sering bermasalah

3.3 Upaya Yang Dilakukan

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada BKAD Kabupaten Pangkep telah berjalan secara optimal sesuai dengan konsep pengelolaan, peraturan normatif, serta berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengelolaan aset tetap juga dilakukan oleh para pengurus barang pengguna OPD dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dalam pengelolaan aset tetap, hal ini menuntut BKAD utamanya bidang aset selaku pembantu pengelola dan pusat pengelolaan aset daerah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan guna mengoptimalkan proses pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam rangka mempertahankan opini WTP, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Pangkep;
- b. Mengajukan usulan tambahan formasi personel bidang aset;
- c. Meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) ;
- d. Merintis penerapan aplikasi SIPKD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Pangkep;
- e. Melakukan penjemputan data inventaris aset ke masing- masing OPD.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Pangkep berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Dikarenakan masih ditemukannya kendala-kendala yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan aset tetap pada BKAD Kabupaten Pangkep. Pengelolaan aset bukanlah perkara yang mudah, hal ini dapat terlihat dari pencapaian Kabupaten Paangkep yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi masih terdapat catatan kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Pangkep yang ditemukan BPK meliputi pengelolaan aset tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset tetap yang belum dinilai karena tidak diketahui keberadaannya dan belum diinventarisir aset tetap secara maksimal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan tanda kepemilikan. Pengelolaan aset tetap memiliki kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Pangkep. Karena aset tetap merupakan salah satu komponen aset negara yang memiliki nilai sangat besar dan mempunyai peran yang juga sangat penting dalam hal pembangunan nasional. Aset tetap diantaranya adalah Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, jaringan dan irigasi. Selain itu kontribusi dalam hal pengelolaan aset tetap dapat berupa pendapatan negara yang disumbangkan kepada APBN/APBD.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep yang banyak membantu dan mensukseskan selama proses magang dan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Baharuddin, A. (2017). *BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintah Daerah*. CV. Batam Publisher.
- Gunawan. (2020). *Edukasi Dalam Rangka Optimalisasi Masyarakat Menghadapi Covid-19*. LP2M UIN SGD Bandung.
- Ilyas, A. (2020). *Kontrak Publik*. Prenada Media.
- Kountur, R. (2007). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM
- Kristanto. (2019). *Revaluasi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Implikasi PMK No. 191/PMK.10/2015*. PT. Jawa Raya: Putra Tani.

Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah-Edisi Terbaru/Ed.III*. ANDI.

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Grahlia Indonesia.

Purnairawan, E. & S. S. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indoneisa.

Rauf, R. (2016). *Materi Kuliah Pengelolaan Aset*. UIR.

Sinurat, M. (2015). *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Pustaka Rahmat.

Siregar, D. (2016). *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Sinergi Manajemen Aset (ASET).

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta. Syamsul Hadi. (2006). *Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, K. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. CV. Nas Media Pustaka, Makassar.

